

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Selasa, 2 Maret 2021



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media online dan media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Liputan6.com	Selasa, 2 Maret 2021	Uniknya Rumah Desa Disulap Jadi Objek Wisata Baru, Penuh Mural Warna-Warni	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Perumahan telah menggulirkan bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan Bedah Rumah dengan alokasi anggaran Rp 4,78 triliun pada tahun 2020. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4494830/uniknya-rumah-desa-disulap-jadi-objek-wisata-baru-penuh-mural-warna-warni https://properti.kompas.com/read/2021/03/01/100000221/20-rumah-di-gorontalo-jadi-obyek-wisata https://www.wartaekonomi.co.id/read329948/bsps-pupr-satu-desa-di-kota-gorontalo-jadi-wisata-baru-karena-mural-warna-warni
2	Kompas.com	Selasa, 2 Maret 2021	Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Selenggarakan Seminar Nasional INACID/ KNI-ID 2021	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan Universitas Lampung (UNILA) menyelenggarakan Seminar Nasional INACID/ KNI-ID 2021 di Universitas Lampung (UNILA), Bandar Lampung, Sabtu (27/2/2021). https://biz.kompas.com/read/2021/03/01/133204028/ditjen-sumber-daya-air-kementerian-pupr-selenggarakan-seminar-nasional-inacid.
3	Antaraneews.com	Selasa, 2 Maret 2021	Menteri PUPR targetkan 30.000 rumah nonsubsidi dapat insentif PPN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan sebanyak 30.000 rumah nonsubsidi mendapatkan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor perumahan. https://www.inews.id/finance/makro/ke-menterian-pupr-targetkan-30000-rumah-nonsubsidi-dapat-insentif-ppn https://www.antaranews.com/berita/202156/menteri-pupr-targetkan-30000-rumah-nonsubsidi-dapat-insentif-ppn https://www.jpnn.com/news/pupr-targetkan-30-ribu-rumah-nonsubsidi-dapat-keringanan-ppn-hingga-100-persen

4	wartaekonomi.co.id	Selasa, 2 Maret 2021	PUPR Targetkan Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran Selesai Maret 2021i	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan tahap akhir pembangunan Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran sepanjang 14,19 Km. Ruas tol ini merupakan salah satu dari 6 ruas Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR II) yang dibangun untuk melengkapi struktur jaringan jalan di kawasan Metropolitan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) https://www.wartaekonomi.co.id/read330102/pupr-targetkan-jalan-tol-cengkareng-batuceper-kunciran-selesai-maret-2021
5	wartaekonomi.co.id	Selasa, 2 Maret 2021	PUPR Bangun 2 Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik di Jakarta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya tengah menyelesaikan pembangunan instalasi pengelolaan air limbah domestik (IPALD) di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur dan Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. https://www.wartaekonomi.co.id/read330131/pupr-bangun-2-instalasi-pengelolaan-air-limbah-domestik-di-jakarta

Judul	Dana Infrastruktur Tetap Mengalir Deras	Tanggal	2 Maret 2021
Media	Media Indonesia (Halaman, 9)		
Resume	DANA APBN untuk infrastruktur masih mendominasi pembangunan di daerah. Di Kota Malang, Jawa Timur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mendanai Program Kota tanpa Kumuh. Kementerian PU-Pera mengklaim telah terjadi pengurangan kumuh di Malang seluas 536,27 hektare. Sisanya akan diselesaikan pada 2020-2024.		

Dana Infrastruktur Tetap Mengalir Deras

DANA APBN untuk infrastruktur masih mendominasi pembangunan di daerah. Di Kota Malang, Jawa Timur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mendanai Program Kota tanpa Kumuh.

Salah satunya menyasar Kampung Heritage Kayutangan. Dana yang digulirkan dalam program Kotaku itu mencapai Rp23 miliar. “Akhir Maret, pekerjaan di Kayutangan ditargetkan tuntas,” kata Koordinator Kotaku Kementerian PU-Pera Arief Prasetyo, kemarin.

Di kampung *heritage*, pembangunan menyasar pembuatan ornamen gapura, pekerjaan saluran air, jalan rabat ampyang, dan paving. Selain itu juga dibangun ruang terbuka hijau, ruang terbuka publik, dan jaringan proteksi kebakaran.

Program Kota Tanpa Kumuh bergulir sejak 2015 merambah 29 kelurahan di 57 kampung di Kota Malang. Selama 2015-2019, luas permukiman kumuh di Kota Malang seluas 608,60 hektare dan pada 2020 mengentaskan 72,33 hektare dari kekumuhan.

Kementerian PU-Pera mengklaim telah terjadi pengurangan kumuh di Malang seluas 536,27 hektare. Sisanya akan diselesaikan pada 2020-2024.

Di Sumatra Selatan, dana Rp1,59 triliun akan digunakan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional untuk perbaikan dan pembangunan jalan. “Anggaran dari APBN itu untuk 64 paket pekerjaan. Bentuknya proyek pemeliharaan, peningkatan, penanganan, pembangunan ruas jalan dan jembatan di wilayah Sumatra Selatan,” ujar Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional wilayah Sumsel, Kgs Syaiful Anwar.

Sementara itu, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan mengaku mengusulkan enam proyek strategis nasional ke pemerintah pusat. “Keenam proyek berupa sektor pariwisata, pertanian, transportasi, dan sumber daya air. Salah satunya ialah proyek penyediaan air baku di Belitung yang mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Tanjung Kelayang.” (BN/DW/RF/AP/N-3)

Judul	Obral Insentif Sektor Perumahan	Tanggal	2 Maret 2021
Media	Koran Tempo		
Resume	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan sebanyak 30.000 rumah nonsubsidi mendapatkan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor perumahan.		

Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dengan skema ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun dengan kriteria tertentu. Insentif ini diharapkan dapat mendorong penjualan rumah yang telah dibangun pengembang pada 2020 dan 2021.



OBRAL INSENTIF SEKTOR PERUMAHAN

Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dengan skema ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun dengan kriteria tertentu. Insentif ini diharapkan dapat mendorong penjualan rumah yang telah dibangun pengembang pada 2020 dan 2021. Berikut ini fasilitas yang diberikan pemerintah dan kriteria penerimanya.

- Harga jual maksimal Rp 5 miliar.
 - Harga jual hingga Rp 2 miliar: 100 persen PPN ditanggung pemerintah
 - Harga jual Rp 2-5 miliar: 50 persen PPN ditanggung pemerintah
- Diserahkan secara fisik pada periode pemberian insentif.
- Merupakan rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni.
- Diberikan maksimal untuk satu unit rumah tapak/rumah susun untuk satu orang dan tidak boleh dijual dalam jangka waktu satu tahun.
- Pemberian insentif mulai berlaku pada 1 Maret hingga 31 Agustus 2021.



Besaran Insentif Bebas PPN Rumah Non-Subsidi

Rentang Harga	Jumlah Stok	Nilai Total	Nilai PPN
Rp 300 juta-1 miliar	9.000 unit	Rp 9 triliun	Rp 0,9 triliun
Rp 1-2 miliar	9.000 unit	Rp 18 triliun	Rp 1,8 triliun
Rp 2-3 miliar	4.500 unit	Rp 13,5 triliun	Rp 1,35 triliun
Rp 3-5 miliar	4.500 unit	Rp 22,5 triliun	Rp 2,25 triliun

SUMBER: KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
GHODA RAHMAH